

MENDORONG PENGEMBANGAN KUMKM DALAM PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN

Dandan Irawan^{1*)}

¹ LPPM Ikopin Bandung, Jawa Barat

^{*)} adit@yahoo.co.id

ABSTRACT

Koperasi, usaha kecil dan menengah (KUMKM) merupakan usaha kecil skala mikro merupakan bagian terbesar dari pelaku bisnis di Indonesia. Upaya pemberdayaan terhadap KUMKM menjadi bagian penting dari agenda pembangunan nasional, khususnya dalam mendorong pengembangan kegiatan usahanya. Sebab disadari bahwa meningkatnya produktivitas bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM) sebagai pelaku usaha, bukan semata-mata ditentukan oleh modal (uang) yang besar tetapi karena adanya kesadaran dan kepedulian menggali sumberdaya yang dimiliki. Untuk itu diperlukan suatu stimulus yang berkesinambungan agar muncul kesadaran dan kepedulian yang dimulai dari masing-masing pelaku usaha (KUMKM), untuk selanjutnya didorong untuk dapat meningkatkan produktivitas. Peningkatan pembinaan KUMKM pada masa mendatang akan sejalan dengan berbagai aspirasi yang timbul di masyarakat luas yang mengharapkan peningkatan keberadaan KUMKM dalam pembangunan perekonomian. Upaya pemerintah dalam membentuk iklim usaha yang kondusif sudah mulai dilakukan, tetapi belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usaha termasuk di dalamnya fasilitas kredit khusus, pembebasan pajak impor, akses terhadap informasi pasar, dan lain-lain. Pada prinsipnya, secara umum ada dua cara untuk membantu KUMKM. *Pertama*, melalui program pengembangan yang dapat membantu KUMKM berproduksi atau berusaha secara lebih efisien sehingga dapat bersaing secara efektif dengan pada perusahaan besar pada lini-lini yang cocok, yang skalanya memang lebih kecil dari perusahaan besar. *Kedua*, bantuan yang bersifat protektif atau restriksi, yaitu membantu KUMKM dengan jalan menghalangi perusahaan lain sehingga dapat mendorong KUMKM yang hanya dapat hidup selama KUMKM tersebut terlindungi dari persaingan dengan produsen atau perusahaan lain yang lebih efisien.

Keywords: Koperasi, usaha kecil dan menengah (KUMKM).

1. Pendahuluan

Pembangunan Nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Indonesia seutuhnya di berbagai aspek kehidupan dan dilaksanakan secara berkesinambungan, oleh karena itu, Pembangunan Nasional harus melibatkan seluruh masyarakat Indonesia, baik para penyelenggara negara maupun segenap rakyat Indonesia. Sementara pembangunan ekonomi yang hanya menekankan kepada pertumbuhan ekonomi, ternyata menimbulkan permasalahan lainnya, baik dari aspek ekonomi maupun aspek lainnya seperti sosial politik dan keamanan. Kesenjangan ekonomi dan sosial semakin lebar, sebab fondasi

perekonomian Indonesia hanya ditopang oleh sekelompok pelaku ekonomi dengan skala besar, yang juga memperoleh fasilitas besar dari pemerintah. Padahal apabila secara jujur diakui, terlihat bahwa kokohnya perekonomian, sangat didukung oleh pelaku usaha yang berada dalam skala kecil dan menengah.

Koperasi, usaha kecil dan menengah (KUMKM) merupakan usaha kecil skala mikro merupakan bagian terbesar dari pelaku bisnis di Indonesia. Upaya pemberdayaan terhadap KUMKM menjadi bagian penting dari agenda pembangunan nasional, khususnya dalam mendorong pengembangan kegiatan usahanya. Sebab disadari bahwa mening-

katnya produktivitas bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM) sebagai pelaku usaha, bukan semata-mata ditentukan oleh modal (uang) yang besar tetapi karena adanya kesadaran dan kepedulian menggali sumberdaya yang dimiliki. Untuk itu diperlukan suatu stimulus yang berkesinambungan agar muncul kesadaran dan kepedulian yang dimulai dari masing-masing pelaku usaha (KUMKM), untuk selanjutnya didorong untuk dapat meningkatkan produktivitas.

KUMKM di Indonesia merupakan bagian penting dalam sistem perekonomian nasional, karena mempunyai peran mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui misi penyediaan lapangan usaha dan lapangan kerja. Peningkatan pendapatan masyarakat dan ikut berperan dalam perolehan devisa negara serta memperkokoh struktur usaha nasional. Hal ini tampak saat krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada pertengahan 1997, yang berdampak luas terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat, termasuk pula pada perkembangan sektor KUMKM. Pada masa krisis tersebut, banyak perusahaan besar yang selama ini diandalkan guna menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia, ternyata mengalami kebangkrutan, sehingga usaha kecilpun mengalami dampaknya. Namun demikian, fakta menunjukkan bahwa dalam kondisi krisis tersebut, KUMKM justru menunjukkan ketahanan yang lebih, dibandingkan perusahaan besar.

Hingga bulan Maret 2010, menurut Kementerian Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia, jumlah koperasi di Indonesia mencapai 175.102 unit, dengan jumlah anggota 29.124 juta orang. Volume usaha pada 2010 meningkat 13,25% dengan jumlah Rp77,514 triliun dan modal sendiri tercatat Rp30,656 triliun atau meningkat 35,88%. Adapun data Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia, bahwa sekitar 99% dari total unit usaha di seluruh Indonesia merupakan unit UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah). Angka tersebut setara dengan 51,26 juta unit usaha.

Peningkatan jumlah pelaku usaha KUMKM maupun transaksi, belum sepenuhnya mampu mengangkat KUMKM menjadi "pemain penting" dalam dunia usaha di Indonesia, sebab KUMKM selalu dihadapkan pada permasalahan, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Permasalahan internal antara lain meliputi :

- 1). Keterbatasan wawasan bisnis serta pengetahuan pengelolaan usaha dengan baik. Seseorang yang mempunyai wawasan bisnis baik, akan dapat dengan cepat mampu

menangkap dan memanfaatkan peluang yang ada secara efektif. Kemampuan berusaha ini tidak dapat ditingkatkan dengan cepat, tetapi melalui proses bertahap, apalagi jika terkait dengan kultur masyarakat.

- 2). Kesulitan memperoleh akses pasar, karena keterbatasan pengetahuan tentang jaringan pemasaran yang ada. Pada umumnya ketersediaan volume pasar yang besar itu disertai syarat-syarat tertentu yang menyangkut mutu, ketepatan *delivery*, pelayanan dan sebagainya.
- 3). Keterbatasan pengetahuan dalam manajemen produksi, termasuk pengembangan produk, sistem teknologi dan sebagainya, sehingga dapat menyulitkan pemenuhan kebutuhan pasar yang khas.
- 4). Keterbatasan modal investasi maupun modal kerja, serta kemampuan mengelola usaha masih terbatas, sehingga tidak mudah mendapat akses pembiayaan ke bank atau kreditor lain. Bisnis sulit berkembang, karena hanya mengandalkan modal sendiri saja.

Adapun permasalahan eksternal meliputi antara lain:

- 1) Fasilitas dan iklim usaha yang makin kondusif, namun belum efektif atau belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KUMKM.
- 2) Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan KUMKM belum berjalan lancar.
- 3) Kurangnya fasilitas atau berbagai kemudahan yang mampu mendorong perkembangan KUMKM berupa undang-undang, skema kredit dan sebagainya.
- 4) Terbatasnya prasarana dan sarana yang mendukung pembinaan dan pengembangan KUMKM seperti transportasi dan institusi lainnya.

2. Pengembangan KUMKM

Pemberdayaan potensi usaha KUMKM ialah upaya membangun daya dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkan dan mempertahankannya. Pemberdayaan juga memberikan kesempatan, dukungan yang lebih besar kepada pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup Koperasi dan UKM.

Keberdayaan KUMKM berarti KUMKM sebagai lembaga dan pelaku usaha memungkinkan KUMKM untuk bertahan dan dinamis dalam mengembangkan diri serta mencapai kemajuan yang sangat berarti bagi dirinya dan lingkungan-

nya. Memberdayakan KUMKM berarti upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat KUMKM dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, ketertinggalan; dimana KUMKM menjadi mampu dan mandiri.

Pemberdayaan usaha tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa faktor di antaranya adalah :

- a. Dimensi rasional
- b. Dimensi moral
- c. Pendekatan pembangunan
- d. Bantuan material dan bantuan keterampilan teknis dan manajerial
- e. Teknologi luar dan lokal
- f. Keefektifan lembaga
- g. Pola ROI
- h. Sektor produktif dan tidak produktif
- i. Akses terhadap sumber dana

Pada tahun-tahun mendatang, KUMKM diharapkan dapat lebih berperan dalam pembangunan usaha dan ekonomi daerah. Misi dan tujuan pengembangan KUMKM diarahkan tidak saja untuk memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha serta pada peningkatan ekspor, namun juga ditujukan untuk mengemban misi pengentasan kemiskinan, menumbuhkan kegiatan ekonomi daerah, memperkuat struktur usaha, serta pertumbuhan usaha jangka panjang.

Peningkatan pembinaan KUMKM pada masa mendatang akan sejalan dengan berbagai aspirasi yang timbul di masyarakat luas yang mengharapkan peningkatan keberadaan KUMKM dalam pembangunan perekonomian. Oleh karena itu pembinaan KUMKM perlu ditingkatkan, diperluas dan diperdalam. Upaya pemerintah dalam membentuk iklim usaha yang kondusif sudah mulai dilakukan. Iklim usaha yang diupayakan pemerintah dan peluang yang ada belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usaha termasuk di dalamnya fasilitas kredit khusus, pembebasan pajak impor, akses terhadap informasi pasar, dan lain-lain.

Pada prinsipnya, secara umum ada dua cara untuk membantu KUMKM. *Pertama*, melalui program pengembangan yang dapat membantu KUMKM berproduksi atau berusaha secara lebih efisien sehingga dapat bersaing secara efektif dengan pada perusahaan besar pada lini-lini yang cocok untuk KUMKM yang skalanya memang lebih kecil dari perusahaan besar. *Kedua*, bantuan yang bersifat protektif (melindungi) atau restriksi (pembatasan), yaitu membantu KUMKM dengan jalan menghalangi perusahaan lain sehingga dapat mendorong KUMKM yang hanya dapat hidup

selama KUMKM tersebut terlindungi dari persaingan dengan produsen atau perusahaan lain yang lebih efisien.

Selanjutnya dalam rangka pembinaan KUMKM dapat dilakukan tiga prinsip penting yang perlu dipertimbangkan, yaitu: (1) prinsip kombinasi dan interaksi, (2) prinsip adaptasi, (3) prinsip seleksi. Implikasi praktis dari ketiga prinsip ini adalah bahwa perencanaan program pembinaan harus komprehensif untuk mengidentifikasi kekuatan-kekuatan utama yang mempengaruhi KUMKM dan interaksi diantara kekuatan-kekuatan itu dalam lingkungan lokal.

Pengembangan KUMKM menempuh kebijakan yang pelaksanaannya akan didukung bersama oleh semua pihak/ instansi terkait, serta tersusun dari komponen-komponen kebijakan yang universal, yaitu :

- a. Menggariskan prioritas sektoral pengembangan KUMKM melalui pemilihan jenis-jenis industri yang dijadikan fokus pengembangan untuk dijadikan acuan prioritas bagi aparat pembina secara terpadu/lintas instansi, baik di pusat maupun di daerah, di mana pilihan jenis industri dan komoditi yang akan dikembangkan disesuaikan dengan kecocokan potensi dan prospek tumbuh di daerah pengembangan yang bersangkutan.
- b. Melakukan kegiatan pemberdayaan agar para pelaku KUMKM :
 - 1) Mempunyai wawasan dan jiwa wirausaha yang ulet, patriotik (cinta produk dalam negeri), dan profesional.
 - 2) Mampu mengidentifikasi, mengembangkan ataupun memanfaatkan peluang usaha.
 - 3) Mampu mendayagunakan sumberdaya produktif dan mengakses pasar (lokal, dalam negeri maupun ekspor).
 - 4) Mempunyai kemampuan manajemen usaha, keahlian dan ketrampilan teknis/teknologis.
 - 5) Mampu membangun daya-saing (berwawasan efisiensi, produktivitas dan mutu, proaktif-kreatif-inovatif).

3. Simpulan

Dari tulisan di atas disimpulkan hal-hal penting sebagai berikut :

- a. KUMKM selalu dihadapkan pada permasalahan baik yang bersifat internal maupun eksternal. Permasalahan internal antara lain meliputi :

- 1) Keterbatasan wawasan bisnis serta pengetahuan pengelolaan usaha.
- 2) Kesulitan memperoleh akses pasar, karena keterbatasan pengetahuan tentang jaringan pemasaran yang ada.
- 3) Keterbatasan pengetahuan dalam manajemen produksi.
- 4) Keterbatasan modal investasi maupun modal kerja.

Adapun permasalahan eksternal meliputi:

- 1). Fasilitas dan iklim usaha belum dapat dimanfaatkan secara optimal.
 - 2). Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan KUMKM belum berjalan lancar.
 - 3). Kurangnya fasilitas.
 - 4). Terbatasnya prasarana sarana
- b. Peningkatan pembinaan KUMKM perlu ditingkatkan, diperluas dan diperdalam. Upaya yang dapat dilakukan antara lain :
- 1). Membentuk iklim usaha yang kondusif
 - 2). Memperluas fasilitas kredit khusus
 - 3). Pembebasan pajak impor
 - 4). Akses terhadap informasi pasar
 - 5). Pendampingan dan konsultasi
 - 6). dan sebagainya.
- c. Terdapat dua cara untuk membantu KUMKM, yaitu :
- 1). Program pengembangan yang dapat membantu KUMKM berproduksi atau berusaha secara lebih efisien sehingga dapat bersaing secara efektif dengan pada perusahaan besar pada lini-lini yang cocok untuk KUMKM yang skalanya memang lebih kecil dari perusahaan besar.
 - 2). Program bantuan yang bersifat protektif (melindungi) atau restriksi (pembatasan), yaitu membantu KUMKM dengan jalan menghalangi perusahaan lain sehingga dapat mendorong KUMKM yang hanya dapat hidup selama KUMKM tersebut terlindungi dari persaingan dengan produsen atau perusahaan lain yang lebih efisien.

Daftar Pustaka

- Alma, Buchari. 2007. *Kewirausahaan*, Edisi Revisi, Bandung: Penerbit Alfabeta
- Freddy rangkuti. 1999. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*, PT Gramedia
- Gasperz Vincent. 1997. *Manajemen Kualitas : Penerapan Konsep-Konsep Kualitas Dalam Manajemen Bisnis Total*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- GTZ. 1990. *Competency-Based Economies Through Formation of Entrepreneur*, CEFE
- Hermawan Kartajaya, Philip Kotler. 2007. *Marketeing 3,0 Values Driven Marketing*, Jakarta: Gramedia
- Kasmir. 2007. *Kewirausahaan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa
- Kementerian Pendidikan Nasional. 2010. *Panduan Pelatihan Kewirausahaan. 2010, Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Pendidikan Non Formal dan Informal*.
- Philip Kotler. 2007. *Manajemen Pemasaran*, Erlangga
- Soesarsono. 2002. *Pengantar Kewirausahaan, Buku I*, Bogor: Jurusan Teknologi Industri IPB
- Suryana. 2001. *Kewirausahaan*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Triton PB. 2007. *Entrepreneurship : Kiat Sukses Menjadi Pengusaha*, Tugu
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah